

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan dadang solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Inu Kencana Syafei, 2002 *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Luthfi J. Kurniawan, 2010, *Perihal Negara, Hukum dan kebijakan Publik*, Malang: Setara Press.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neil Hawke LLB dan Neil Parpworth, 2017, *Pengantar Hukum Administrasi*, Bandung: Nusa Media.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Purwadarminta, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rian Nugroho Dwijowijoto, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S.F. marbun, 2013, *Hukum Administrasi negara*, Yogyakarta: FH. UII Press.
- S.H. Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kata Hasta.
- Said Zainal Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas.
- Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, FH UNAIR.
- _____, 1998, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos

Jurnal

- Abdul Hamid. "Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Academica*, Vol. 3, No. 1, Februari 2011, hlm. 536.
- Abdul Rahim, Hasbullah dan Sastrio Mansur "Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala", *e Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 11, November 2017, hlm. 25.

- Dadi Rosadi dan Febi Oktarista Andriawan. “Aplikasi Sistem Informasi Pencarian Tempat Kos Di kota Bandung Berbasis Android”, *Jurnal Computech & Bisnis*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hlm. 50.
- Eny Kusdarini. “Arti Penting dan Implementasi Hukum Perizinan Dalam Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Civics*, Vol. 2, No. 2, Desember 2005, hlm. 90.
- Herrista Anggie Wijono Putri, Sjamsiar Sjamsuddin, Abdul Wachid. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, hlm. 415.
- Kamaruddin Singka, Andi Samsu Alam, Nurlinah. “Analisis Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Baubau”, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2011, hlm. 99.
- Muhammad Insa Ansari. “Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha Di Aceh Besar Dan Aceh Barat Daya”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 24.
- Mariana Claudia Kairupan. “Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002”, *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 5, Juli, 2018, hlm. 126.
- Pramudi Utomo. “Dinamika pelajar dan mahasiswa di sekitar kampus Yogyakarta (Telaah Pengelolaan rumah kontrak dan rumah sewa)”, *International symposium on management of student dormitory*, 2009, hlm. 13-14.
- Sitti Hajar, Made Susilawati, D.P.E. Nilakusmawati, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Rumah Kost”, *e-Jurnal Matematika*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2012, hlm. 25.

Sumber Internet

- Abouturban, “Mau Dirikan Kos-kosan? Ketahui Tata Perizinan Baru Izin Membangunnya Berikut Ini”, <http://www.abouturban.com/2018/03/19/mau-dirikan-kos-kosan-ketahui-tata-perizinan-baru-izin-embangunnya-berikut-ini/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 23.00 WIB.

Ahadi, *Perbedaan Rumah Kontrakan dan Kost*, <http://www.ilmusipil.com/perbedaan-rumah-kontrakan-dan-kost>, diakses pada tanggal 30 Juni 2019, pukul 23.00 WIB.

Boby suryawan, “definisi kos”<https://www.scribd.com/doc/288003775/Definisi-Kos>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019, pukul 23.00 WIB.

Febrie Hastiyanto, “*Kos, Kontrak, Sewa*”, <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/04/06/kos-kontrak-sewa/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2019, pukul 23.00 WIB.

Hestanti, Fungsi dan Tujuan Perizinan”, <https://www.hestanto.web.id/fungsi-dan-tujuan-perizinan/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 23.00 WIB.

Helyani N.Gonti, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal, <https://media.neliti.com/media/publications/144724-ID-kewenangan-pemerintah-daerah-dalam-menge.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019, pukul 243.00 WIB.

Mamikos, “*Ringkasan Kost Bulanan Bandar Lampung Murah*”, <https://mamikos.com/kost/kost-bulanan-bandar-lampung-murah>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 23.00 WIB.

NN, “Pengertian dan Tips Memilih Kos-Kosan, Kos dan Indekos Lengkap”, <https://homefage.blogspot.com/2016/04/pengertian-dan-tips-memilih-kos-kosan.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 23.00 WIB.